

**DEPOPULASI DAN TEKANAN PENDUDUK TERHADAP LAHAN DI  
DAERAH PERDESAAN: Studi Determinan Regional Depopulasi  
Perdesaan dan Konsekuensinya Pada Tekanan Penduduk Atas  
Lahan di Perdesaan Kabupaten Bantul \***

oleh

**R. Rijanta dan Bambang Sriyanto Eko Prakoso\*\***

**INTISARI**

*Depopulasi perdesaan atau menurunnya jumlah absolut penduduk perdesaan merupakan fenomena baru dalam sejarah kependudukan Indonesia. Fenomena ini mulai terlihat nyata di DIY sejak tahun 1990an. Sejauh ini belum ada penelitian yang menelaah hubungan antara depopulasi perdesaan sebagai wujud perubahan perilaku reproduksi dan migrasi penduduk di satu pihak dengan arah dan intensitas penggunaan lahan perdesaan di lain pihak sebagai wujud perubahan lingkungan binaan. Selanjutnya pertanyaan tentang konsekuensi depopulasi terhadap perbaikan kesejahteraan penduduk perdesaan juga penting dicari jawabannya, sebab selama ini berbagai kebijakan kependudukan umumnya berasumsi jumlah penduduk yang kecil merupakan prakondisi untuk meningkatkan kesejahteraan.*

*Tujuan penelitian ini adalah untuk (1). menyusun tipologi daerah perdesaan menurut tingkat depopulasinya, (2). mengenali determinan-determinan depopulasi perdesaan pada tingkat regional. Selanjutnya berdasarkan tipologi yang tersusun akan dilakukan penelitian pada tingkat rumahtangga untuk mengetahui (1). faktor-faktor internal pada tingkat rumahtangga yang mendorong terjadinya depopulasi, (2). konsekuensi depopulasi perdesaan pada intensitas dan orientasi penggunaan lahan perdesaan pada tingkat rumahtangga dan (3). konsekuensi depopulasi perdesaan pada tingkat kesejahteraan rumahtangga.*

*Studi penyusunan tipologi perdesaan menurut tingkat depopulasinya akan memanfaatkan data sekunder BPS dan data primer disertai observasi lapangan dengan teknik rapid rural appraisal (RRA). Dalam penyusunan tipologi perdesaan dan pengenalan determinan depopulasi perdesaan pada tingkat regional digunakan metode pemetaan dan tumpang-susun peta dalam rangka mengenali hubungan relasional secara spasial dengan bantuan teknologi Sistem Informasi Geografi (GIS). Survei rumahtangga dilakukan pada desa-desa yang dipilih berdasarkan hasil tipologi di atas.*

\* Disarikan dari hasil penelitian yang dibiayai oleh Proyek Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pengetahuan Dasar, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun Anggaran 1997/1998.

\*\* Staf Pengajar Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

*Survai rumahtangga ini diperlukan untuk menjelaskan berbagai faktor internal yang mendorong rumahtangga perdesaan mengalami depopulasi dan mengenali konsekuensi depopulasi perdesaan pada intensitas dan orientasi penggunaan lahan. Analisis statistik baik yang bersifat deskriptif maupun relasional akan dipergunakan untuk mencapai tujuan penelitian.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keruangan wilayah perdesaan di Kabupaten Bantul yang mengalami depopulasi berbentuk dua buah gugus, yaitu: (a). satu gugus besar di wilayah dataran rendah yang meliputi Kecamatan Tirtohargo, Srigading, Bumbanglipuro, Srandakan, Pundong dan sebagian Imogoiro dan (b). satu buah gugus kecil di sekitar Kecamatan Dlingo. Terdapat empat macam faktor yang menentukan terjadinya depopulasi perdesaan di Kabupaten Bantul, yaitu: (a). faktor fisik alamiah yang berupa kerentanan wilayah terhadap bencana alam banjir dan kekeringan, (b). tingkat pendidikan masyarakat yang relatif tinggi, (c). isolasi wilayah yang tercermin dari sulitnya interaksi dengan Kota Yogyakarta sebagai pusat penyedia kesempatan kerja non-pertanian serta (d). terjadinya migrasi keluar yang besar sebagai akibat dari sempitnya kemungkinan melakukan mobilitas non-permanen ke kota secara efisien.*

*Depopulasi perdesaan pada tingkat rumahtangga terjadi karena rendahnya tingkat kelahiran dan kematian selama lima belas tahun terakhir disertai dengan tingkat migrasi keluar yang tinggi pula. Menurunnya jumlah absolut penduduk perdesaan pada tingkat rumahtangga ditangkap sebagai peluang untuk melonggarkan tekanan subsistensi dalam rangka menuju komersialisasi pertanian pada skala usaha yang amat kecil. Konsekuensinya depopulasi perdesaan tidak diikuti dengan penurunan tekanan penduduk atas lahan, tetapi sebaliknya justru diikuti dengan peningkatan intensitas tanam penggunaan masukan dan teknologi modern serta pemanfaatan tenaga kerja luar keluarga. sebagai suplemen kecilnya jumlah tenaga kerja rumahtangga. Meskipun secara sosial-ekonomi depopulasi telah mampu mengantarkan masyarakat pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, namun keberlanjutan kegiatan komersialisasi ini perlu dipertanyakan.*

## PENGANTAR

Daerah perdesaan di negara sedang berkembang seringkali dideskripsikan sebagai daerah yang mengalami kelebihan penduduk. sehingga tekanan penduduk atas sumberdaya lahan terjadi pada tingkatan yang sangat berat. Hasil studi mengenai kaitan penduduk dan sumberdaya lahan di Indonesia sampai dengan tahun 1970an diwarnai dengan pesimisme untuk tercapainya kehidupan yang lebih baik di daerah perdesaan. Aspek penduduk pada periode ini, dan bahkan sampai saat ini, dianggap sebagai variabel yang berhubungan langsung secara negatif dengan pertumbuhan ekonomi (Titus, 1991). Hal ini tercermin dari banyaknya program-program pembangunan baik yang bersifat insentif maupun disinsentif yang ditujukan untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk. Pada gilirannya dengan kebijakan tersebut diharapkan akan terjadi imbanagan

yang lebih rasional antara jumlah penduduk dan sumberdaya, sehingga tingkat kesejahteraan penduduk dapat dengan lebih mudah diperbaiki.

Pembangunan bidang kependudukan melalui transmigrasi, keluarga berencana dan kesehatan telah mengantarkan masyarakat Indonesia pada tercapainya sasaran antara pembangunan bidang kependudukan, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang relatif rendah untuk ukuran negara sedang berkembang. Bahkan untuk kondisi sebagian daerah perdesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat laju pertumbuhan penduduk negatif (Huisman dan Stoffers. 1991; Kasto. 1993). Ini berarti bahwa secara absolut jumlah penduduk di daerah perdesaan akan semakin berkurang dan tekanan penduduk atas lahan pun secara teoretik juga berangsur-angsur menurun. Pada saat yang sama untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hal ini juga disertai dengan diversifikasi ekonomi perdesaan, sehingga tekanan penduduk atas sumberdaya lahan pertanian di daerah perdesaan diduga sudah semakin berkurang. Bukti-bukti empirik menunjukkan bahwa diversifikasi perdesaan ini didorong juga oleh keberhasilan pembangunan bidang infrastruktur (Rotge, 1992).

Menurunnya jumlah absolut penduduk daerah perdesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan fenomena baru dalam sejarah kependudukan Indonesia setelah kemerdekaan. Sebagai suatu fenomena baru hal ini belum terdokumentasikan dengan baik dan sistematis. Demikian pula determinan-determinannya pada tingkat regional dan rumah tangga juga belum dimengerti secara pasti. Dalam hal ini kaitan antara depopulasi perdesaan sebagai cerminan perubahan perilaku reproduksi dan migrasi penduduk di satu pihak dengan orientasi dan intensitas penggunaan lahan perdesaan sebagai wujud lingkungan binaan di pihak lainnya bersama-sama dengan diversifikasi ekonomi perdesaan juga merupakan hal yang perlu dipelajari dalam rangka mengenali berbagai determinan depopulasi perdesaan baik pada tingkat regional maupun rumah tangga. Pertanyaan sentral yang juga penting dijawab adalah mengenai kesejahteraan penduduk di daerah-daerah yang mengalami depopulasi: benarkah dengan jumlah penduduk yang lebih kecil kesejahteraan yang lebih baik telah dapat dicapai ?

Secara umum penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara proses depopulasi perdesaan dengan tekanan penduduk atas lahan pada tingkat regional dan rumah tangga. Secara rinci tujuan penelitian dapat dipilahkan menjadi dua tingkatan sebagai berikut:

1. Pada tingkat makro bertujuan (a) menyusun tipologi daerah perdesaan menurut tingkat depopulasinya, dan (b) mengenali determinan-determinan depopulasi perdesaan pada tingkat regional.
2. Pada tingkat mikro, berdasarkan tipologi daerah perdesaan menurut tingkat depopulasinya dilakukan survai rumah tangga untuk mengetahui (a) faktor-faktor internal pada tingkat rumah tangga yang mendorong terjadinya depopulasi, (b) konsekuensi depopulasi perdesaan pada intensitas dan orientasi penggunaan lahan perdesaan pada tingkat rumah tangga dan (c) konsekuensi depopulasi perdesaan pada tingkat kesejahteraan rumah tangga.

## STUDI PENDAHULUAN DAN KERANGKA TEORETIK

Studi mengenai imbalan antara penduduk dan suberdaya lahan yang ada pada umumnya bermaksud menunjukkan besarnya permasalahan ketimpangan antara kuantitas penduduk dengan sumber-sumber ekonomi (Boserup, 1965; Bryant, 1973; Titus, 1991). Catatan-catatan yang ada sejak jaman kolonial menunjukkan bahwa kelebihan penduduk di Pulau Jawa sudah dirasakan semenjak awal abad ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program kolonisasi mulai 1905 (Pelzer, 1945; Heeren, 1979). Meskipun sebagai program yang berorientasi demografis kolonisasi dapat dikatakan gagal dalam mengimbangi jumlah penduduk yang masuk ke Jawa, namun sebagai permukiman pioner ia telah mampu menarik lebih banyak transmigran swakarsa. Bahkan tidak berlebihan pernyataan Mantra (1981) bahwa transmigran, melalui mekanisme migrasi berantai, akan menarik sanak saudaranya untuk menetap di daerah baru.

Jika kolonisasi, yang sekarang dikenal dengan transmigrasi, dapat dikatakan gagal memenuhi tujuan demografisnya, maka program lainnya seperti keluarga berencana justru menunjukkan hasil yang sangat baik dari sudut pandang demografis. Hal ini secara makro ditunjukkan oleh laju pertumbuhan penduduk nasional yang selalu berhasil ditekan dari satu periode sensus penduduk ke periode lainnya. Bahkan dengan kemajuan di bidang kesehatan yang selalu berhasil menekan angka mortalitas, secara keseluruhan laju pertumbuhan penduduk secara nasional selalu dapat diturunkan. Dalam upaya ini nampaknya Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat sukses tertinggi pada tingkat nasional seperti ditunjukkan dengan rendahnya laju pertumbuhan penduduk negatif di daerah-daerah perdesaan (Kasto, 1993; PPK-UGM, 1990 dan Hill, 1989).

Fenomena depopulasi perdesaan yang dialami Daerah Istimewa Yogyakarta ini nampaknya belum pernah dialami daerah-daerah lainnya di Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun demikian belum ada penelitian khusus mengenai fenomena ini beserta determinan dan berbagai konsekuensinya pada berbagai tingkat pengamatan. Dengan demikian terdapat kesulitan yang cukup berarti dalam menggali kepustakaan yang relevan dengan topik tersebut. Namun demikian beberapa pengalaman dari negara lain pada masa yang berbeda mungkin dapat digunakan sebagai kerangka acuan dalam menelaah fenomena ini di Indonesia, meskipun replikasi secara penuh jelas tidak mungkin dilakukan.

Pengalaman negara-negara industri di Eropa menunjukkan bahwa depopulasi perdesaan juga terjadi pada masa revolusi industri. Depopulasi terjadi sebagai akibat tingginya tingkat urbanisasi pada penduduk usia muda untuk memperoleh pekerjaan di sektor industri yang terletak di kota. Hal ini kemudian memberikan kemungkinan terjadinya restrukturisasi agraris yang memungkinkan mekanisasi pertanian secara efisien (Zelinsky, et al. 1970). Proses yang mirip dengan pengalaman Eropa tersebut nampaknya pernah terulang juga di Asia Timur seperti Korea, Jepang dan Taiwan (White, 1986).

Pertumbuhan sektor non-pertanian yang relatif terdesentralisasi di kota-kota kecil di negara-negara Asia Timur tersebut juga mampu menarik penduduk perdesaan untuk beralih pekerjaan ke sektor pertanian. Jadi depopulasi perdesaan tidak terjadi secara intensif, karena pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan di kota-kota terdekat yang

tidak memaksa seseorang untuk berpindah ke kota. Meskipun demikian karena produktivitas sektor non-pertanian lebih tinggi daripada sektor pertanian, akhirnya petani-petani kecil justru melepaskan tanahnya. Akibatnya lahan pertanian yang dioperasikan oleh petani menjadi semakin besar yang juga mendorong mekanisasi dan komersialisasi pertanian.

Beberapa pengamatan penelitian terakhir di daerah perdesaan Kabupaten Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta mulai menunjukkan adanya gejala awal pengusahaan komoditas pertanian komersial, terutama di sekitar daerah perkotaan (Rotge, 1992). Namun demikian meskipun pekerjaan non-pertanian di kota juga menawarkan produktivitas per satuan waktu yang lebih tinggi daripada sektor pertanian di desa, namun belum ada bukti-bukti empirik yang menunjukkan banyaknya petani kecil yang melepaskan tanahnya. Preposisi terakhir ini mungkin juga perlu diuji kebenarannya di lapangan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian mengenai depopulasi dan perubahan penggunaan lahan di perdesaan ini mengambil tempat di Kabupaten Bantul, karena secara obyektif daerah ini mewakili daerah di Pulau Jawa yang mengalami proses depopulasi, yaitu menurunnya jumlah absolut penduduk sebagai akibat laju pertumbuhan penduduk yang negatif.

Penelitian ini dilakukan dengan dua tingkat analisis, dalam dua tahap, yaitu: (1) Tahap I analisis makro regional untuk menentukan tipologi daerah perdesaan di Kabupaten Bantul menurut tingkat depopulasinya dan mengenali determinan-determinan regional yang menentukan tingkat depopulasi perdesaan termasuk di dalamnya aspek-aspek kebijakan pembangunan (2) Tahap II analisis mikro untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya depopulasi pada rumah tangga perdesaan dan mengenali konsekuensi depopulasi perdesaan pada penggunaan lahan dan kesejahteraan rumah tangga perdesaan

### **Tahap I. Analisis Makro**

Analisis makro regional dilakukan dengan teknik skoring, indexing, pemetaan dan tumpang-susun (overlay) peta-peta tematik untuk menentukan tipologi daerah perdesaan menurut tingkat depopulasinya. Data sekunder dari setiap desa di Kabupaten Bantul digali dari dokumen hasil Sensus Penduduk 1980 dan 1990 yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Jakarta. Data tersebut diperlukan dalam rangka mengidentifikasi variabel-variabel yang akan digunakan untuk menggambarkan tingkat depopulasi perdesaan beserta faktor-faktor determinannya. Selain itu sebuah checklist untuk pedoman wawancara juga disusun untuk memperoleh data terbaru mengenai depopulasi perdesaan, khususnya memuat variabel-variabel yang tidak terdapat dalam dokumen data sekunder BPS. Pada saat yang bersamaan observasi lapangan dengan teknik rapid rural appraisal (RRA) dilakukan untuk memperoleh konfirmasi berbagai kesimpulan sementara dari hasil analisis data sekunder.

Tingkat depopulasi perdesaan diukur dengan laju pertumbuhan penduduk tahunan, sedangkan determinan-determinannya dicari dari variabel-variabel berikut: (1) Jarak relatif desa terhadap Kota Yogyakarta, (2) Tingkat pendidikan masyarakat, (3) Rasio jenis kelamin sebagai proksi migrasi, dan (4) Kerentanan terhadap bencana alam.

Dalam analisis dipergunakan perangkat komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak sistem informasi geografi (Arch-Info) yang dapat memberi kemudahan dalam pengelolaan, pengolahan, penyimpanan dan penampilan informasi keruangan. Untuk mencari faktor-faktor yang menentukan tingkat depopulasi perdesaan dilakukan analisis tumpang susun antara peta tingkat depopulasi perdesaan dengan peta-peta lain yang memuat tema-tema yang diperkirakan menentukan tingkat depopulasi. Hasil analisis keruangan dengan pemetaan dan tumpang-susun tingkat depopulasi perdesaan menggunakan Arch-Info ini selanjutnya ditafsirkan artinya dan diidentifikasi implikasinya.

## **Tahap II. Analisis Mikro**

Berdasarkan hasil analisis makro dipilih beberapa unit daerah perdesaan yang mencerminkan tingkat depopulasi perdesaan dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Studi kasus dalam bentuk survey rumahtangga dilakukan di beberapa desa yang mencerminkan semua tingkat depopulasi perdesaan. Desa sebagai wakil setiap tingkat depopulasi akan dipilih yang diperkirakan paling representatif untuk mewakili kelas yang bersangkutan. Sementara responden akan dipilih secara acak dari populasi rumahtangga perdesaan yang mengalami depopulasi perdesaan di setiap zona dengan tingkat depopulasi yang berbeda-beda. Dari setiap desa yang mewakili suatu tingkat depopulasi tertentu diambil sekitar 5 persen rumahtangga sebagai responden. Dengan jumlah sampel tersebut secara keseluruhan terdapat sekitar 302 responden yang tersebar di tiga desa dan satu desa kontrol sebagai pembanding.

Survey rumahtangga pada Tahap II ini mencakup pengumpulan data primer yang menyangkut topik-topik berikut: (1) Identitas rumahtangga, (2) Basis demografi rumahtangga (jumlah anggota, struktur, komposisi), (3) Dinamika demografi (kelahiran kematian, migrasi), (4) Aset sumberdaya untuk produksi termasuk lahan pertanian maupun sumberdaya non-pertanian beserta penggunaannya, (5) Alat transportasi yang dimiliki, (6) Kesempatan kerja non-pertanian, (7) Kesempatan kerja pertanian, (8) Produksi pertanian, (9) Mobilitas anggota rumahtangga, (10) Kesejahteraan rumahtangga (pendapatan, pengeluaran, akses untuk memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi).

Pengolahan data dilakukan dengan memanfaatkan perangkat komputer yang dilengkapi dengan perangkat SPSS for Windows dalam rangka menjawab pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mendorong rumahtangga perdesaan mengalami depopulasi serta mengenali konsekuensi depopulasi perdesaan terhadap perubahan penggunaan lahan dan kesejahteraan rumahtangga. Analisis data dilakukan secara deskriptif baik menggunakan tendensi sentral, tabel tunggal dan tabel silang. Penafsiran data selai dilakukan menggunakan hasil tabulasi dan uji statistik deskriptif juga dilengkapi dengan hasil wawancara mendalam dengan informan terpilih.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini sesuai dengan butir-butir tujuan yang digariskan terdahulu terdiri atas: (1) Pola keruangan dan determinan regional depopulasi perdesaan, (2) Depopulasi perdesaan: beberapa ukuran intensitas, (3) Faktor-faktor pendorong terjadinya depopulasi pada tingkat rumahtangga, (4) Konsekuensi depopulasi perdesaan pada tekanan penduduk atas lahan, (5) Konsekuensi depopulasi pada kesejahteraan rumahtangga.

### 1. Pola Keruangan dan Determinan Regional Depopulasi Perdesaan

Depopulasi perdesaan pada tingkat regional dalam penelitian ini diukur dengan laju pertumbuhan penduduk tahunan. Untuk memperoleh laju pertumbuhan penduduk yang tepat, dalam penelitian digunakan data hasil Sensus Penduduk 1980 dan 1990 sebagai pangkal perhitungan. Alasan penggunaan data dari dua hasil sensus ini ialah adanya konsep dan definisi yang sama tentang penduduk total di suatu wilayah, sehingga perhitungan laju pertumbuhan penduduk antar dua sensus tersebut akan menghasilkan angka yang benar. Meskipun tersedia data dengan tahun terbaru untuk Kabupaten Bantul, namun data tersebut bersumber dari registrasi penduduk atau hasil estimasi yang disusun dengan konsep dan definisi yang berbeda, sehingga akan menghasilkan laju pertumbuhan penduduk yang tidak tepat.

Hasil perhitungan pertumbuhan penduduk perdesaan di Kabupaten Bantul secara keseluruhan pada periode 1980-1990 berkisar antara -1,09 sampai dengan 4,58 persen per tahun, atau dengan kisaran (range) sebesar 5,67 persen per tahun. Besarnya kisaran angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul ini menunjukkan adanya keragaman yang amat tinggi dalam hal karakteristik wilayah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dinamika pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi cenderung dialami oleh desa-desa di pinggiran Kota Yogyakarta dan sekitar koridor Yogyakarta - Bantul. Selain itu pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi juga secara sporadis dapat ditemukan di kota kecamatan seperti Imogiri dan Pajangan.

Sementara itu laju pertumbuhan penduduk negatif telah dialami oleh desa-desa di dataran rendah bagian selatan, yaitu di Kecamatan Tirtohargo, Srigading, Srandakan, Bambanglipuro, Imogiri dan Pundong yang sebagian wilayahnya merupakan wilayah rawan bahaya banjir serta penggenangan dalam waktu yang relatif lama pada musim penghujan. Selain itu beberapa desa di sekitar Kecamatan Dlingo yang memiliki relief yang berbukit dan selalu mengalami kekurangan air pada musim kemarau juga banyak yang telah mengalami depopulasi. Gambar 1 berikut menyajikan distribusi desa-desa di Kabupaten Bantul menurut tingkat depopulasinya.

Dilihat pola keruangannya depopulasi perdesaan di Kabupaten Bantul membentuk suatu gugus di bagian selatan sepanjang pantai kecuali Parangtritis dan sepanjang Sungai Opak sampai dengan Sungai Oya. Gugus yang lebih kecil dapat diamati di Kecamatan Dlingo yang terdiri atas Desa Dlingo, Jatimulyo dan Temuwuh. Dengan pola seperti ini dapat ditafsirkan bahwa depopulasi penduduk perdesaan

cenderung terjadi di wilayah yang rawan bencana alam, khususnya banjir dan kekeringan. Meskipun demikian dari hasil tumpang-susun dengan peta-peta tematik lainnya juga memberikan indikasi pentingnya faktor pendidikan dan migrasi. Ini ditunjukkan oleh adanya asosiasi yang kuat antara fenomena depopulasi dengan tingginya penduduk yang melek huruf dan rendahnya angka rasio jenis kelamin.

Faktor pendidikan yang dilihat dari data tahun 1993 menunjukkan bahwa desa-desa yang terdepulasi memiliki tingkat melek huruf yang tertinggi, sekelas dengan wilayah di pinggiran kota Yogyakarta. Ini berarti bahwa pendidikan penduduk yang tinggi merupakan sebagian faktor pendorong terjadinya proses depopulasi perdesaan di wilayah dataran rendah Kabupaten Bantul. Orang yang terdidik dapat melihat alternatif lain untuk melakukan perbaikan hidup di luar desanya, sehingga keadaan desa yang rawan bencana dan kurang memberikan kesempatan ekonomi yang sesuai dengan harapan akan mendorong migran potensial melakukan migrasi keluar. Sementara bagi mereka yang tetap tinggal di desa, tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan membuka wawasan mereka kepada alternatif strategi kehidupan yang sesuai dengan setting sumberdaya alam setempat serta naungan sumberdaya produktif yang dimiliki masing-masing rumahtangga. Dalam hal ini minimalisasi ukuran rumahtangga dalam bentuk rumahtangga inti merupakan pilihan yang semakin banyak ditempuh untuk mengantisipasi semakin mengecilnya ketersediaan sumberdaya lahan dan menurunnya tekanan subsistensi.

Dari data sekunder dapat diamati bahwa di Kabupaten Bantul selama tahun 1980 sampai 1990 terjadi penurunan ukuran rumahtangga rata-rata dari 4,6 jiwa/rumahtangga menjadi 4,1 jiwa per rumahtangga. Jika kecenderungan ini berlangsung terus sampai dengan tahun 2000 nanti, maka Sensus Penduduk 2000 akan mencatat angka ukuran rumahtangga yang kurang dari 4 orang/rumahtangga. Ini berarti akan semakin banyak rumahtangga muda di perdesaan yang memiliki anak kurang dari dua orang. Artinya, sebagian pasangan muda tidak lagi khawatir untuk memiliki anak dengan jumlah yang kecil, karena dengan adanya berbagai kemajuan di bidang pelayanan kesehatan telah mampu membentuk keyakinan masyarakat bahwa kelangsungan hidup anak memiliki probabilitas yang semakin tinggi dari waktu ke waktu. Selain ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, pengetahuan masyarakatpun juga sudah cukup rasional untuk mengambil keputusan mengenai besarnya jumlah anggota rumahtangga yang cukup kecil dibandingkan generasi sebelumnya. Ini juga sejalan dengan fakta bahwa angka mortalitas yang sudah rendah, seperti di DIY pada umumnya, diikuti dengan angka fertilitas yang rendah.

Depopulasi perdesaan selain disebabkan oleh semakin kuatnya masyarakat dalam menganut norma keluarga kecil, juga disebabkan oleh tingginya angka migrasi keluar dari wilayah-wilayah yang terdepulasi tersebut. Kelangkaan data migrasi yang dapat dipercaya pada unit analisis desa menyebabkan kesulitan yang berarti dalam menafsirkan keterkaitan antara depopulasi dengan migrasi. Untuk kepentingan melihat besar kecilnya migrasi di suatu desa digunakan proksi rasio jenis kelamin. Hal ini didasari suatu fakta bahwa migrasi itu biasanya selektif menurut umur dan jenis kelamin. Kelompok penduduk yang potensial bermigrasi ialah mereka yang masih dalam usia



kerja dan berjenis kelamin laki-laki. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah laki-laki terhadap jumlah perempuan di suatu wilayah. Jika angkanya lebih besar dari 100 berarti ini mencerminkan wilayah dengan surplus migrasi masuk, sedangkan angka kurang dari 100 mencerminkan wilayah yang mengalami defisit migrasi.

Kebanyakan desa-desa di Kabupaten Bantul memiliki angka rasio jenis kelamin yang kurang dari 100. Artinya, sebagian besar desa di kabupaten ini merupakan desa yang mengalami defisit migrasi. Desa-desa yang memiliki surplus migrasi terletak di sekitar Kota Yogyakarta, sebagai konsekuensi wilayah yang memang harus menerima luberan penduduk migran dari Kotamadya Yogyakarta atau daerah-daerah lainnya. Sementara desa-desa yang mengalami depopulasi perdesaan pada umumnya juga memiliki angka rasio jenis kelamin yang kurang dari 100. Ini berarti bahwa migrasi keluar yang besar juga terjadi di desa-desa yang mengalami depopulasi perdesaan.

Faktor lain yang juga sangat penting peranannya adalah aksesibilitas dari desa-desa yang terdewopulasi ke Kota Yogyakarta. Depopulasi perdesaan cenderung tidak terjadi di wilayah-wilayah dengan akses yang mudah ke Kota Yogyakarta, karena akses yang mudah ke kota dapat mengurangi tekanan ekonomi rumahtangga perdesaan dengan jalan melakukan komutasi (nglaju) ke kota untuk memperoleh pekerjaan. Desa-desa yang terdewopulasi berada di luar zona komutasi yang efisien ke Kota Yogyakarta. Hal ini diperkuat dengan pengamatan lapangan bahwa pelayanan angkutan umum belum menjangkau desa-desa yang terdewopulasi, atau jika telah ada pelayanan angkutan umum akan memakan waktu antara 1-2 jam atau lebih, sehingga tidak efisien bagi penglaju yang umumnya bekerja di sektor-sektor ekonomi inferior di kota. Dengan perjalanan menggunakan kendaraan umum sejauh itu akan terlalu besar porsi waktu yang dicurahkan dan penghasilan yang terserap untuk biaya angkutan. Oleh karena itu kesulitan ekonomi yang dihadapi rumahtangga akibat rendahnya pendapatan di sektor pertanian cenderung diatasi dengan mekanisme migrasi secara permanen atau sirkulasi dalam rangka menangkap peluang ekonomi non pertanian di tempat lain.

Dengan demikian secara ringkas dapat disimpulkan faktor-faktor yang menentukan terjadinya depopulasi perdesaan ini meliputi (a). faktor alamiah berupa kerentanan wilayah terhadap bencana banjir dan kekeringan, (b). faktor laju pertumbuhan penduduk alami yang semakin menurun seperti terlihat dari semakin populernya struktur rumahtangga inti dan semakin mengecilnya ukuran rata-rata jumlah anggota rumahtangga dan (c). faktor migrasi keluar yang besar karena kecilnya kemungkinan untuk mencari kesempatan kerja non-pertanian di kota terdekat yang diakibatkan oleh (d) lokasi desa yang berada di luar zona komutasi ke Kota Yogyakarta yang dapat menawarkan kesempatan kerja non-pertanian.

## **2. Depopulasi Perdesaan: Beberapa Ukuran Intensitas**

Intensitas terjadinya depopulasi perdesaan dapat dilihat dari perubahan ukuran rata-rata jumlah anggota rumahtangga dari waktu ke waktu. Secara absolut ukuran ini dapat dilihat dari jumlah anggota rumahtangga rata-rata saat ini dan perkembangannya selama sepuluh tahun terakhir. Desa-desa Dlingo, Srigading dan Tirtohargo yang mewakili desa-desa yang mengalami proses depopulasi umumnya memiliki rata-rata

ukuran rumahtangga mendekati 4 orang per rumahtangga. Sementara Wirokerten sebagai desa kontrol menunjukkan angka rata-rata jumlah anggota rumahtangga yang mendekati angka 5.

Dapat dikemukakan bahwa desa-desa yang mengalami depopulasi memang terbukti memiliki rata-rata jumlah anggota rumahtangga yang jauh lebih kecil daripada kelompok kontrol. Hal ini antara lain dapat dilihat dari besarnya proporsi rumahtangga dengan struktur rumahtangga inti yang berukuran kecil di Desa-desa Dlingo, Srigading dan Tirtohargo; sementara Desa Wirokerten yang ditampilkan sebagai kelompok kontrol menunjukkan proporsi rumahtangga dengan struktur ekstended dan kompleks dengan ukuran rumahtangga yang besar. Hal ini juga konsisten dengan angka-rata-rata jumlah anggota yang cenderung lebih kecil di desa-desa terdewopulasi daripada di desa kontrol.

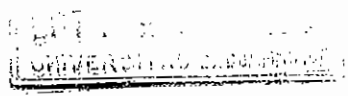
Ukuran depopulasi menggunakan angka rata-rata jumlah anggota rumahtangga hanya akan memberikan gambaran sesaat saat ini. Untuk menunjukkan proses depopulasi di desa-desa yang diteliti dapat ditunjukkan perkembangan jumlah anggota rumahtangga selama sepuluh tahun terakhir.

Dibandingkan dengan kondisi 1980-1990 ketika desa-desa tersebut mencatat laju pertumbuhan penduduk yang negatif, struktur perubahan ukuran rata-rata jumlah anggota rumahtangga di daerah penelitian sampai saat ini masih juga menunjukkan kecenderungan stagnasi atau bahkan penurunan. Hal ini terlihat dari besarnya proporsi rumahtangga yang mengalami perkembangan turun dan tetap secara keseluruhan dalam waktu sepuluh tahun terakhir, utamanya untuk Desa Srigading dan Tirtohargo.

Sementara Desa Dlingo, meskipun telah mengalami depopulasi semenjak 1980-1990, namun proporsi rumahtangga yang mengalami perkembangan jumlah anggota rumahtangga naik dan tetap proporsinya menyerupai Desa Wirokerten sebagai kelompok kontrol. Hal ini terjadi sebagai akibat masih tersedianya lahan yang relatif luas di desa ini dan sementara itu sebagian masyarakatnya melakukan mobilisasi non-permanen ke kota-kota besar yang pada gilirannya juga akan kembali menetap sebagai rumahtangga di Dlingo dengan dukungan sumberdaya keuangan dari para pelaku mobilitas non-permanen yang sementara tinggal di kota. Jika interpretasi ini dapat diterima maka laju pertumbuhan penduduk yang negatif di Dlingo ini kemungkinan tidak akan berlangsung lama, karena semakin besarnya orang yang menggantungkan hidupnya dari ekonomi kota yang memperlakukan Dlingo sebagai tempat tinggal utamanya di hari depan.

### **3. Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Depopulasi Pada Tingkat Rumahtangga**

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya depopulasi perdesaan dapat dilihat berbagai komponen yang mempengaruhi perkembangan penduduk yang meliputi kelahiran, kematian serta migrasi sejak tahun 1980 sampai dengan saat ini. Kelahiran selama lima belas tahun terakhir ini sudah menurun dengan drastis. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan besarnya jumlah penduduk berusia kurang dari lima tahun dengan kelompok penduduk dengan umur yang lebih tinggi. Secara konsisten di semua desa sampel yang mengalami depopulasi kelompok penduduk umur kurang dari lima tahun besarnya kurang dari separuh kelompok penduduk umur 5-14 tahun. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tingkat



fertilitas secara gradual pada masyarakat yang tengah mengalami depopulasi pedesaan selama sekitar 15 tahun terakhir.

Hal ini nampaknya juga berkaitan dengan suatu kenyataan bahwa di wilayah yang mengalami depopulasi memang mengindikasikan rendahnya fertilitas dan mortalitas, tetapi mengalami migrasi keluar yang amat besar. Data anak yang pernah dilahirkan hidup (ALH), anak yang masih hidup (AMH) dan tempat tinggal anak-anak dari wanita berumur 50 tahun ke atas semuanya mendukung preposisi di atas. Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa pada rumahtangga yang sudah paripurna, tempat tinggal anak menunjukkan adanya migrasi keluar yang amat besar. Suatu rumahtangga dianggap paripurna jika isteri sudah mengalami menopause, yang dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai wanita yang pernah kawin dan sudah berumur 50 tahun ke atas.

Variasi yang amat kontras dalam migrasi keluar dapat diamati antara desa-desa yang terdewopulasi disatu sisi dengan desa kontrol di pihak lainnya. Anak-anak dari desa-desa yang mengalami depopulasi lebih cenderung memisahkan diri dari rumahtangga orangtuanya, utamanya dengan meninggalkan propinsi DIY. Di desa-desa yang mengalami depopulasi antara 30-40 persen anak-anak dari rumahtangga yang sudah paripurna tinggal di propinsi lain. Kelompok yang sama pada desa kontrol proporsinya hanya sekitar 20 persen.

Perbedaan yang kontras ini nampaknya juga berkaitan dengan peluang ekonomi yang sangat terbatas di desa-desa yang terdewopulasi. Pada tingkat rumahtangga dapat diamati bahwa aset penguasaan sumberdaya lahan sebagai basis produksi primer. Secara keseluruhan rata-rata penguasaan lahan yang terdiri atas sawah, tegalan dan pekarangan di semua desa yang diteliti dapat dikategorikan sangat rendah dan tidak akan cukup untuk pemenuhan kebutuhan subsistensi rumahtangga. Penny dan Singarimbun (1973) membuat perkiraan agar dapat hidup cukupan satu rumahtangga harus menguasai setidaknya 0,7 hektar sawah dan 0,3 hektar lahan kering atau secara keseluruhannya sekitar 1 hektar. Jika dibandingkan dengan patokan tersebut, maka hanya sebagian kecil (kurang dari 5 persen saja) rumahtangga di desa-desa yang diteliti akan dapat hidup cukupan dengan kegiatan pertanian.

Rata-rata penguasaan lahan di desa-desa yang diteliti yang terluas ada di Desa Dlingo (0,555 hektar/rumahtangga), disusul Srigading dan Wirokerten dengan 0,422 dan 0,337 hektar/rumahtangga. Sementara di Tirohargo rata-rata luas lahannya hanya 0,3039 hektar/rumahtangga. Dengan kondisi luas penguasaan lahan yang demikian beragam ini dapat diperkirakan terdapat beragam strategi rumahtangga dalam mengatasi permasalahan ekonomi rumahtangganya. Berbagai keragaman tentang strategi rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan ekonominya akan disajikan pada pembahasan tentang tekanan penduduk atas lahan, sebagai konsekuensi depopulasi pedesaan.

Sementara secara geografis desa-desa terdewopulasi merupakan bagian dari propinsi DIY yang relatif terisolir dari pelayanan transportasi umum. Dengan demikian akses untuk memperoleh alternatif pekerjaan di luar pertanian yang banyak tersedia di kota menjadi sangat terbatas. Hal ini juga dapat diamati dari relatif rendahnya tingkat diversifikasi mata pencaharian di desa-desa yang mengalami depopulasi, khususnya Tirohargo dan Srigading. Kelangkaan pekerjaan non-pertanian yang dilakukan

penduduk desa-desa ini baik bersifat in-situ maupun di tempat lain merupakan bukti rendahnya tingkat diversifikasi ekonomi pada rumahtangga yang diteliti di Tirtoharjo dan Srigading. Kecuali Dlingo dan Wirokerten sebagai desa kontrol, proporsi rumahtangga yang memiliki pekerjaan non-pertanian baik sebagai pekerjaan pokok maupun sebagai pekerjaan tambahan hanya sekitar sepertiga dari keseluruhan rumahtangga yang diteliti.

Dapat diamati bahwa di Wirokerten dan Dlingo keterlibatan rumahtangga dalam kegiatan non-pertanian mencapai proporsi hampir 90 persen. Wirokerten berasosiasi dengan wilayah pinggiran kota yang relatif padat penduduk dan memiliki akses ke kota yang amat tinggi, sehingga corak mata pencaharian utama penduduknya adalah non-pertanian. Sementara Dlingo juga memiliki proporsi rumahtangga non-pertanian yang hampir sama dengan Wirokerten. Hal ini sebagai konsekuensi tingginya proporsi penduduk yang melakukan kegiatan sirkulasi ke kota, tetapi secara periodik masih kembali ke Dlingo karena secara de jure memang mereka adalah penduduk Dlingo. Sekitar 50 persen rumahtangga di Dlingo memiliki anggota rumahtangga yang melakukan mobilitas non-permanen ke kota, sementara di desa-desa penelitian lainnya proporsi rumahtangga semacam ini hanya sekitar sepertiga saja.

Akses ke kota dan pekerjaan non-pertanian yang baik di Dlingo dan Wirokerten yang amat baik, nampaknya tidak ditemukan di Tirtoharjo dan Srigading seperti ditunjukkan relatif rendahnya proporsi rumahtangga yang terlibat kegiatan non-pertanian yang hanya sekitar sepertiganya saja. Hal ini agak mengejutkan, karena banyak ahli mempostulasikan bahwa di wilayah padi sawah biasanya kegiatan ekonomi masyarakat sangat terdiversifikasi (Slater, 1991 dan Braay, 1986). Nampaknya ketidakhadiran diversifikasi ekonomi di dua desa ini dikompensasi dengan diversifikasi dan komersialisasi pertanian ke arah tanaman yang bernilai tinggi dengan masukan kapital yang tinggi pula tetapi memiliki masa gestasi yang sangat pendek, yaitu cabai dan bawang merah.

#### **4. Konsekuensi Depopulasi Perdesaan Pada Tekanan Penduduk Atas Lahan**

Telah diuraikan di atas bahwa penduduk perdesaan di berbagai wilayah studi dengan naungan sumberdaya lahan yang beragam juga menunjukkan tanggapan yang berbeda-beda terhadap depopulasi. Depopulasi perdesaan di Desa Tirtoharjo dan Srigading mendapatkan tanggapan berbentuk perubahan kegiatan pertanian, khususnya pola tanam yang tidak hanya monokultur padi, orientasi pilihan komoditas komersial yang berumur pendek dan bernilai tinggi, intensitas penggarapan yang tinggi dengan masukan teknologi modern dan suplemen tenaga kerja dari luar keluarga.

Di dua desa ini nampaknya semakin mengecilnya jumlah anggota rumahtangga telah ditanggapi sebagai peluang untuk keluar dari perangkap pertanian subsisten berskala kecil yang hanya memproduksi pangan untuk kepentingan rumahtangga sendiri. Cara-cara rumahtangga di dua desa ini memenuhi kebutuhan pangan, meskipun hanya dengan luasan lahan yang relatif sempit, memberikan dukungan pada interpretasi tersebut. Proporsi rumahtangga yang menanam padi tanpa menjual menunjukkan angka yang sedikit lebih rendah daripada di Wirokerten dan Dlingo. Sementara untuk kelompok

rumahtangga yang memenuhi kebutuhan pangan dengan cara menanam dan menjual serta dengan cara membeli sebagian proporsinya merupakan yang terbesar baik di Srigading maupun Tirtohargo.

Pemenuhan kebutuhan pangan dengan usaha penanaman sendiri nampaknya memang sudah dinilai kurang kondusif bagi pengembangan ekonomi rumahtangga di desa-desa yang paling terdepopulasi. Dalam kondisi seperti ini masyarakat telah mengalami reorientasi ekonomi, sehingga dapat mempertimbangkan pilihan-pilihan yang paling rasional dalam konteks sumberdaya rumahtangga yang ada. Dengan demikian komersialisasi dan perubahan pola tanam dengan berbagai konsekuensi ikutannya memang merupakan pilihan yang paling rasional dalam pandangan hampir semua rumahtangga di dua desa ini.

Dalam kondisi semakin kecilnya jumlah anggota rumahtangga, tenaga kerja keluarga cenderung dimanfaatkan secara optimum dalam kegiatan ekonomi. Bahkan untuk budidaya tanaman cabai dan bawang merah, cukup banyak rumahtangga yang memanfaatkan buruh dari luar daerah sendiri. Dengan demikian depopulasi perdesaan tidak memiliki konsekuensi langsung menurunkan tekanan penduduk atas lahan, tetapi justru sebaliknya dengan terjadinya depopulasi perdesaan terjadi intensitas pemanfaatan sumberdaya lahan secara lebih intensif. Perubahan pola tanam dari padi-padi-palawija menjadi padi-bawang merah-cabai telah membuktikan bahwa intensitas penggunaan lahan tidak menurun bersama dengan menurunnya jumlah penduduk. Kelangkaan jumlah tenaga kerja setempat diatasi dengan pemanfaatan tenaga kerja dari tempat lain.

Kegiatan cocok tanam tanaman bawang merah dan cabai di desa Tirtohargo dan Srigading menyerap curahan kerja yang sedemikian besar, sehingga kegiatan pertanian menyerap sebagian besar tenaga kerja dan waktu yang ada. Bahkan dalam kondisi tertentu ketika terjadi kekurangan tenaga kerja untuk menggarap lahan, banyak warga Tirtohargo dan Srigading yang mendatangkan buruh tani dari daerah Salam, Magelang. Hal ini terlihat dari besarnya proporsi tenaga kerja luar rumahtangga yang dipekerjakan di kedua desa yang merupakan pusat penanaman cabai dan bawang merah.

Selain itu terdapat indikasi yang kuat juga bahwa pengeluaran rumahtangga tani untuk masukan modern seperti pupuk dan pestisida proporsinya cukup besar dalam struktur biaya produksi tanaman komersial semacam bawang merah dan cabai. Hasil perhitungan jumlah masukan rata-rata yang digunakan untuk kegiatan pertanian secara keseluruhan menunjukkan perbedaan yang amat kontras antara Desa Srigading dan Tirtohargo di satu sisi dengan Desa Wirokerten dan Dlingo di sisi lainnya. Rata-rata nilai sarana produksi pertanian yang meliputi pupuk buatan, insektisida, herbisida dan pupuk kandang yang digunakan untuk setiap hektar tanah per tahun di Desa Srigading mencapai Rp 1.301.047,- dan di Desa Tirtohargo mencapai Rp 1.747.430,- ; sedangkan di Desa Dlingo dan Wirokerten berturut-turut hanya Rp 230.398,- dan Rp 348.801,-. Besarnya perbedaan angka rata-rata nilai sarana produksi yang digunakan di desa-desa penelitian seperti di atas menunjukkan perbedaan ragam kegiatan pertanian yang berorientasi subsisten di satu pihak dan berorientasi komersial di pihak yang lain.

Hal lain yang juga membuktikan adanya orientasi komersial ialah adanya upaya-upaya yang sistematis untuk mengatasi ketidakpastian ketersediaan air yang muncul oleh

karena bencana kekeringan dan atau banjir. Kendala alamiah tersebut diatasi dengan pemanfaatan pompa air yang dimiliki sebagian besar warga Srigading dan Tirtoharjo. Pompa air berturut-turut dimiliki sekitar 65,7 persen dan 65,0 persen responden dari Srigading dan Tirtoharjo. Pompa air ini pada umumnya mulai dimiliki setelah tahun 1985, ketika masyarakat menemukan kepercayaan bahwa usaha cocok tanam cabai dan bawang merah dapat diandalkan sebagai penyangga ekonomi rumah tangga yang utama. Dengan demikian investasi yang relatif besar dalam bentuk pompa air pun dilakukan dengan harapan yang akan segera dapat pulih dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Pola adaptasi masyarakat dalam menghadapi depopulasi yang agak berbeda dapat ditemukan di Desa Dlingo. Depopulasi perdesaan yang terjadi karena rendahnya fertilitas dan tingginya mobilitas penduduk permanen maupun non-permanen ke luar desa ini belum ditanggapi secara ekologis seperti dalam bentuk perubahan pola dan orientasi tanam atau penggunaan teknologi produksi dalam kegiatan pertanian. Secara tradisional pola tanam yang ada di desa ini merupakan pertanian subsisten di lahan kering dan marginal. Dalam sistem usaha tani yang dilakukan terdapat komponen-komponen pertanian tanaman semusim, tanaman keras, peternakan ruminansia dan unggas yang masih seperti keadaan pertengahan 1980an seperti yang dilaporkan oleh Huisman dan Stoffers (1991).

Rendahnya tingkat tanggapan yang diberikan oleh masyarakat Dlingo terhadap depopulasi yang terjadi diperkirakan karena masih banyaknya penduduk yang secara periodik melakukan mobilitas non-permanen ke kota. Dengan mekanisme ini kegiatan pertanian di desa dan kegiatan non-pertanian di kota dapat dikombinasikan secara efisien. Namun adanya mekanisme mobilitas non-permanen dan kombinasi kegiatan ekonomi subsisten di perdesaan dengan ekonomi kota nampaknya merupakan penghambat terwujudnya tanggapan ekologis terhadap depopulasi. Dalam rumah tangga migran sirkuler nampaknya sektor subsistensi dipenuhi dari hasil cocok tanam dalam rumah tangga di perdesaan, sedangkan pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier dipenuhi dari hasil kegiatan ekonomi di kota. Dalam kondisi seperti ini investasi di sektor pertanian dalam skala yang cukup besar akan sulit untuk diwujudkan, karena sektor pertanian dilihat sebagai bagian subsistensi dari ekonomi rumah tangga. Hal ini sejalan dengan interpretasi sebelumnya bahwa rumah tangga di Dlingo memang sebagian besar adalah rumah tangga pertanian subsisten dalam arti menanam untuk kebutuhan rumah tangga sendiri tanpa menjual. Jika preposisi ini benar maka dapat disimpulkan bahwa subsistensi pertanian di lahan marginal seperti di Dlingo akan menghambat terjadinya tanggapan ekologis dalam bentuk perubahan pola tanam dalam proses depopulasi. Hal serupa tidak dijumpai di Tirtoharjo dan Srigading di mana sistem pertanian subsisten dikombinasikan dengan sistem pertanian komersial secara efisien. Di atas semuanya itu secara alamiah wilayah dengan sumberdaya lahan kering dan marginal dengan kepadatan penduduk yang rendah memang kurang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan ekonomi yang intensif.

## **5. Konsekuensi Depopulasi Perdesaan Pada Kesejahteraan Rumah tangga**

Terjadinya depopulasi perdesaan yang cukup besar di Desa Srigading dan Tirtohargo yang secara langsung berarti menurunnya tuntutan kebutuhan akan pangan, telah membuka peluang untuk mengurangi kegiatan pertanian subsisten dan pada saat yang sama memperbanyak kegiatan pertanian berorientasi komersial. Bahkan kombinasi kegiatan pertanian subsisten dan komersial yang terjadi di kedua desa telah mampu mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini antara lain dapat dilihat dari komposisi pendapatan, pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi kebutuhan sekunder dan akses untuk memperoleh pelayanan sosial.

Secara keseluruhan pendapatan rumah tangga di Desa Srigading dan Tirtohargo jauh lebih besar daripada di Wirokerten dan Dlingo. Pendapatan tahunan di Srigading dan Tirtohargo berturut-turut mencapai Rp 11.627.326,- dan Rp 5.089.040,-; sedangkan di Dlingo dan Wirokerten berturut-turut Rp 4.780.875,- dan Rp 5.987.031,-. Dilihat lebih jauh mengenai komposisinya pendapatan masyarakat desa di Desa Wirokerten dan Dlingo yang paling dominan berasal dari pekerjaan non-pertanian (antara 50-60 persen), sedangkan pendapatan masyarakat di Desa Srigading dan Tirtohargo terutama berasal dari kegiatan pertanian (lebih dari 60 persen). Tingginya pendapatan pertanian di Srigading dan Tirtohargo ini disebabkan oleh tingginya kontribusi komoditas cabai dan bawang merah.

Besarnya perbedaan tingkat pendapatan tersebut membawa konsekuensi pada besarnya perbedaan tingkat belanja barang-barang konsumsi sekunder. Jumlah nilai konsumsi barang-barang kebutuhan konsumsi sekunder seperti sabun, detergen, pasta gigi dan kosmetik merupakan kebutuhan yang akan segera dipenuhi jika kebutuhan primer telah dapat tercukupi. Rata-rata nilai pembelanjaan barang-barang konsumsi sekunder tersebut untuk setiap tahun antar desa-desa yang mengalami depopulasi dengan desa-desa lainnya menunjukkan perbedaan yang amat kontras. Rata-rata nilai belanja barang konsumsi sekunder di Wirokerten dan Dlingo berturut-turut adalah Rp 39.422,- dan Rp 35.653,- per kapita/tahun atau sekitar 4-6 persen dari pendapatan. Sementara konsumsi kebutuhan barang sekunder di Srigading dan Tirtohargo Rp 41.993,- dan Rp 25.511,- atau sekitar 2-3 persen dari pendapatan. Kemampuan masyarakat di desa-desa yang terdepopulasi untuk memenuhi lebih banyak barang-barang konsumsi sekunder mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik di desa-desa terdepopulasi. Angka indeks pemilikan barang dari sepuluh macam barang yang ditanyakan juga sejalan dengan kecenderungan ini. Indeks tertinggi dicapai oleh Desa Wirokerten (5,11), disusul Srigading, Tirtohargo dan Dlingo berturut-turut 4,88; 4,25 dan 3,8.

Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan sosial seperti dalam hal pilihan jenis pelayanan kesehatan dan jenjang serta jalur pendidikan bagi anak-anak responden. Jenis-jenis pelayanan sosial tersebut dapat diperoleh dengan membayar sejumlah uang tertentu, sehingga pemanfaatan jenis pelayanan tertentu akan mencerminkan tingkat pengetahuan sekaligus daya beli pelakunya. Pilihan masyarakat di desa yang paling terdepopulasi (Srigading dan Tirtohargo) untuk pelayanan kesehatan cenderung memiliki spektrum yang menyebar dari dokter spesialis, dokter umum praktek, dokter puskesmas sampai

dengan mantri/bidan. Pola ini sangat mirip dengan pola yang dibentuk oleh kelompok kontrol Desa Wirokerten, sedangkan Dlingo berdiri sendiri dengan perolehan pelayanan kesehatan yang paling dominan pada dokter puskesmas.

Sementara dari jenis dan keberlanjutan pendidikan anak-anak responden dapat diamati adanya kecenderungan yang amat menarik. Anak-anak dari responden di Desa Srigading dan Tirtohargo memiliki peluang yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan pada sekolah menengah umum (SMU). Sekitar 45-55 persen responden melaporkan adanya anak yang sudah pernah/sedang sekolah di SMU, pola ini amat mirip dengan kelompok kontrol Desa Wirokerten. Sementara kelompok rumahtangga yang sama di Dlingo proporsinya hanya kurang dari 25 persen. Ini berarti peluang mencapai tingkat pendidikan SMU di desa-desa paling terdepopulasi sudah sama dengan peluang memasuki SMU di Desa Wirokerten sebagai kelompok kontrol, tetapi jauh di atas peluang melanjutkan ke SMU di Desa Dlingo.

Keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak dari rumahtangga di Srigading dan Tirtohargo, seperti halnya di Wirokerten, juga lebih terjamin daripada di Dlingo. Antara 8-10 persen rumahtangga melaporkan mengirimkan anak-anaknya ke PTS. Meskipun jika dibandingkan dengan proporsi rumahtangga yang mengirmkan anaknya ke SMU, angka-angka ini jauh lebih rendah; namun secara konsisten tergambar bahwa memang secara ekonomis rumahtangga di Srigading dan Tirtohargo jauh lebih baik daripada di Dlingo, sehingga mampu mengirim anak-anaknya melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi khususnya PTS dengan biaya yang lebih mahal. Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa depopulasi telah ditanggapi dengan perubahan orientasi tanam menuju tanaman komersial dan peningkatan tekanan penduduk atas lahan dalam bentuk intensitas kegiatan cocok tanam dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN

Secara keruangan depopulasi perdesaan terjadi di desa-desa yang relatif terisolasi dari kota Yogyakarta. Terdapat dua gugus desa-desa terdepopulasi yaitu (1). gugus yang terletak di dataran rendah Kecamatan Kretek. Sanden, Srandakan, Pundong dan sebagian Imogiri dan (2). gugus Kecamatan Dlingo. Terdapat empat macam faktor yang menentukan terjadinya depopulasi perdesaan di Kabupaten Bantul, yaitu: (a). faktor alamiah yang berupa kerentanan wilayah terhadap bencana alam banjir dan kekeringan, (b). tingkat pendidikan masyarakat yang relatif tinggi, (c). isolasi wilayah yang tercermin dari sulitnya interaksi dengan Kota Yogyakarta sebagai pusat penyedia kesempatan kerja non-pertanian serta (d). terjadinya migrasi keluar yang besar sebagai akibat dari sempitnya kemungkinan melakukan mobilitas non-permanen ke kota secara efisien.

Dari studi kasus pada tingkat obesrvasi rumahtangga diketahui bahwa rumahtangga di desa-desa yang paling terdepopulasi memang memiliki tingkat kelahiran dan kematian yang rendah, tetapi memiliki tingkat migrasi yang sangat tinggi. Dengan demikian ini merupakan wujud tanggapan demografis atas berbagai kendala alamiah dan



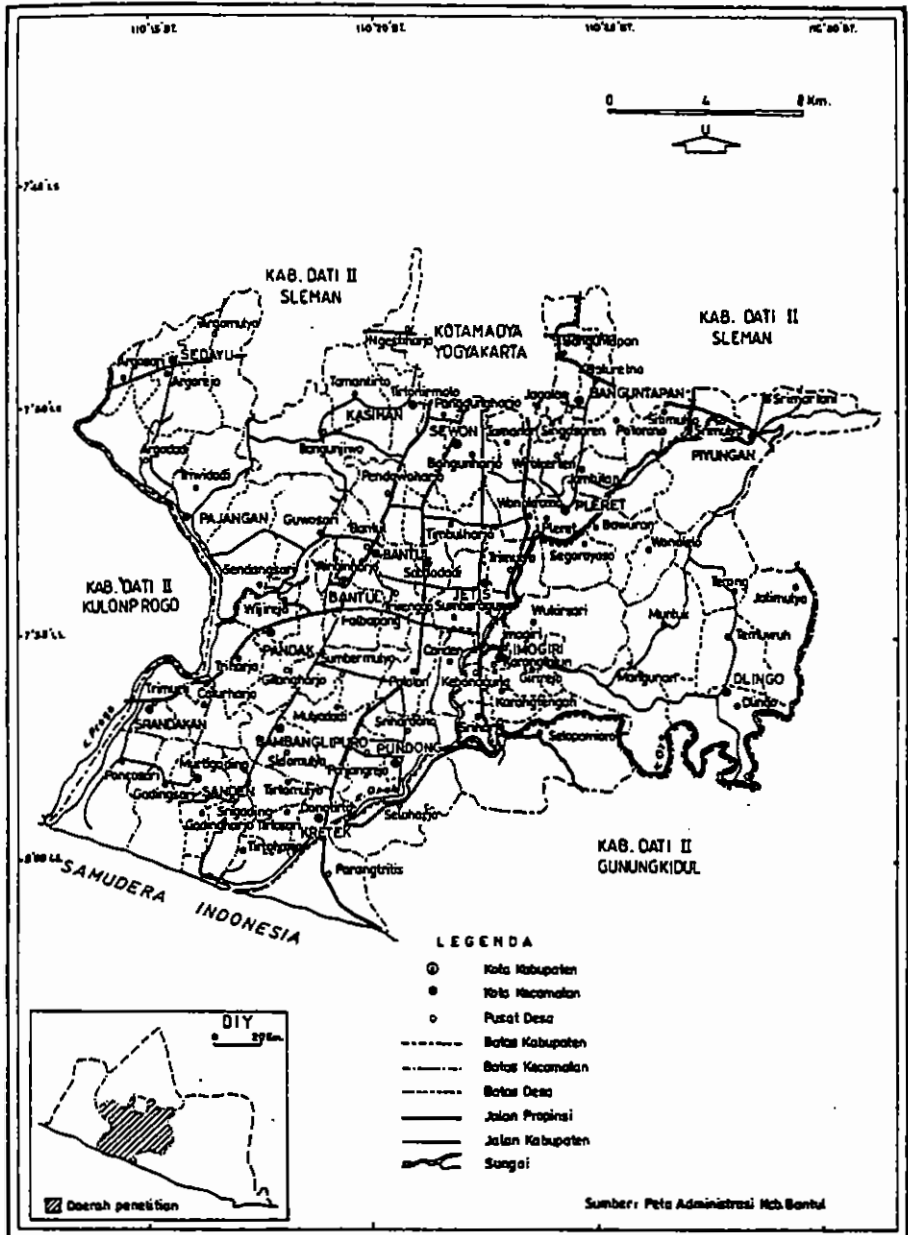
keterbatasan sumberdaya alam pada tingkat wilayah. Penurunan jumlah absolut penduduk perdesaan di tingkat rumahtangga ditangkap sebagai peluang komersialisasi karena tekanan subsistensi semakin melonggar, sehingga langkah yang diambil oleh rumahtangga dalam memperbaiki kehidupannya adalah membentuk kegiatan ekonomi komersial berdampingan dengan ekonomi subsisten. Ini dapat dipandang sebagai tanggapan ekologis atas peningkatan depopulasi perdesaan. Meskipun demikian secara kualitas maupun kuantitas tekanan penduduk atas lahan tidak menurun, bahkan meningkat, bersamaan dengan proses depopulasi. Peningkatan kualitas dan kuantitas tekanan penduduk atas lahan di desa-desa terdewopulasi ini antara lain berwujud pemanfaatan tenaga kerja dari luar rumahtangga dalam kegiatan cocok tanam, pemanfaatan pompa air untuk mengontrol ketersediaan air pada waktu banjir maupun kekeringan serta pemanfaatan masukan pertanian modern (insektisida, pestisida dan pupuk kimia) yang sangat tinggi. Respon ekologis serupa tidak dijumpai di Dlingo yang berlahan marginal dan berpenduduk relatif jarang. Depopulasi perdesaan tidak ditanggapi secara ekologis, karena adanya mekanisme mobilitas penduduk sirkuler yang memungkinkan pembagian kerja pertanian di desa dan non-pertanian di kota. Dalam kondisi seperti ini kegiatan pertanian dilihat sebagai sektor yang subsisten yang menghasilkan produksi untuk memenuhi sebagian kebutuhan primer, sedangkan kegiatan ekonomi di kota sebagai suplemen pemenuhan kebutuhan primer, sekunder maupun tersier.

Dilihat konsekuensinya pada kesejahteraan rumahtangga, secara keseluruhan rumahtangga di Srigading dan Tirtohargo mampu mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi daripada di Dlingo. Hal ini dapat diamati dari besarnya pendapatan untuk setiap rumahtangga dan komposisinya, pembelanjaan untuk kebutuhan sekunder, indeks pemilikan barang, akses pelayanan kesehatan dan akses pelayanan pendidikan. Pertanyaan yang muncul kemudian apakah penggunaan masukan modern yang sangat tinggi dan pemanfaatan pompa air untuk pengendalian air di lingkungan wilayah pantai semacam yang terjadi di Srigading dan Tirtohargo akan memungkinkan terjadinya pemanfaatan sumberdaya lahan secara lestari. Hal ini masih memerlukan pengkajian lebih lanjut.

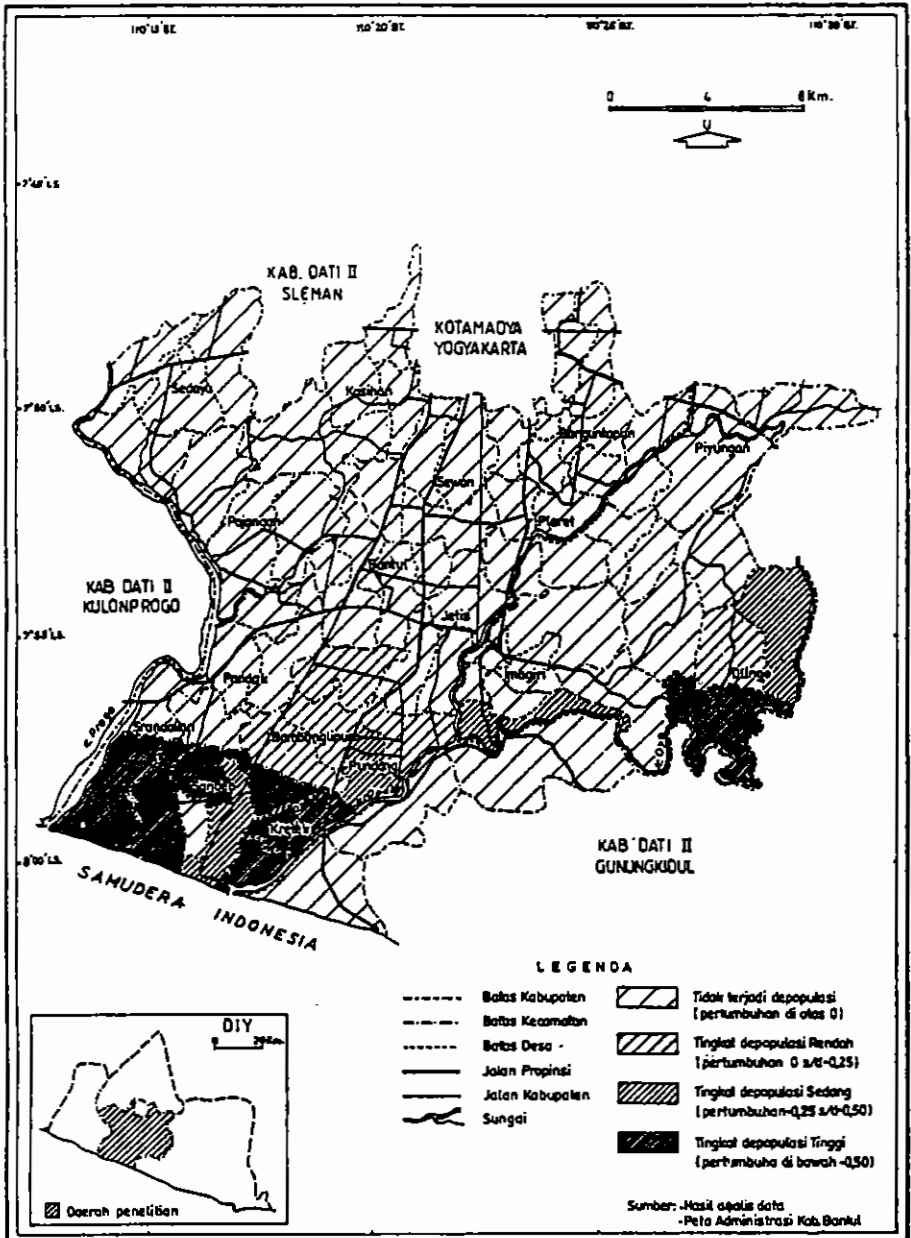
## DAFTAR PUSTAKA

- Boserup, Ester. 1965. *The Conditions of Agricultural Growth*. Chicago: Aldine Publishing Company.
- Bryant, Nevin Arthur. 1973. *Population Pressure and Agricultural Resources in Central Java*. Michigan: University of Michigan. Unpublished Ph.D. Thesis.
- Braay, Fransesca. 1986. *The Rice Economy*. Oxford: Basil Blackwell.
- Heeren, HJ. 1979. *Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Hill, Hall. 1989. *Unity and Diversity: Regional Economic Development in Indonesia Since 1970*. Singapore: Oxford University.
- Huisman, Henk dan JW. Stoffers. 1991. *Rumahtangga, Sumberdaya dan Produksi: Laporan Kedua Keadaan di Kabupaten Bantul*. Yogyakarta: RRDP Fakultas Geografi UGM. Terjemahan.

- Kasto, 1993. *Pertumbuhan Penduduk, Angkatan Kerja dan Pengangguran: Kasus DIY dan Jawa Tengah*. Yogyakarta: PPK-UGM.
- Mantra, Ida Bagus. 1981. *Population Problems and Resettlement Programme in Indonesia*. Paper Presented at the General Conference of the International Union for the Scientific of Population. Manila 9-16 December 1981.
- Pelzer, Karl J. 1945. *Pioneer Settlement in the asiatic Tropic: Studies in Land Utilization and Agricultural Colonization in Sothern Asia*. American Geographical Society.
- PPK-UGM, 1990. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Interaksi Kependudukan dan Sumberdaya Pembangunan di daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: PPK-UGM dan KMN KLH.
- Rotge, Vincent L. 1992. *Rural Employment Shift in the Context of Growing Rural-urban Linkages: Trends and Prospects for DIY*. Paper Presented at The International Conference on Geography in the ASEAN Region. 31 August - 3 September 1992. Yogyakarta. Faculty of Geography, Gadjah Mada University.
- Slater, Richard. 1991. *From Farm to Firm: Rural Diversification in the Asian Country Side*. Avebury: Aldershot.
- Titus, Milan J. 1991. *Masalah Kependudukan dan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: RRDP Fakultas Geografi UGM.
- White, Benjamin. 1986. *Rural Non Farm Employment in Java: Recent Developments, Policy Issues and Research Needs*. The Hague: ISSAS.
- Zelinsky, Wilbur, W. Kosinski, Prothero, 1970. *Geography of Crowding World*. Oxford: Oxford University Press.



Gambar 1; PETA LOKASI PENELITIAN KABUPATEN BANTUL



Gambar 2 ; PETA TINGKAT DEPOPULASI KABUPATEN BANTUL TAHUN 1990